



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2018-2019
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke- :
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
- Dengan : 1. KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan;  
2. KAP Husmi, Mucharam dan Rasidi;  
3. KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan;  
4. KAP Heliantono dan Rekan.
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Senin, 25 Maret 2019
- Waktu : 14.10 WIB s.d 15.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
- Ketua Rapat : Melchias Markus Mekeng
- Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
- Acara : Fit and Proper Test Calon KAP
- Hadir : **CALON KAP:**
1. KAP WISNU KARSONO SOEWITO DAN REKAN;
  2. KAP HUSMI, MUCHARAM DAN RASIDI;
  3. KAP SRIYADI ELLY SUGENG DAN REKAN;
  4. KAP HELIANTONO DAN REKAN.

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT (MELCHIAS MARKUS MEKENG/KETUA KOMISI XI/F-PG):**

**Yang terhormat KAP Helianto dan Rekan,  
Yang terhormat KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan,  
Yang terhormat KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan,  
Yang terhormat KAP KAP Husmi, Mucharam dan Rasidi,  
Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,  
serta hadirin yang berbahagia.**

Menurut catatan dari Sekretariat, daftar hadir telah ditandatangani oleh 10 orang dari 5 Fraksi. Oleh karena itu, kita masih menunggu satu fraksi, namun untuk pengambilan keputusan tentunya harus mempunyai satu kuorum. Nah, untuk tidak menghambat proses ini mungkin saya persilakan masing-masing KAP untuk menyampaikan pemaparannya masing-masing 5 menit. Nanti setelah itu kita mengambil keputusan, kita harus menunggu satu Fraksi lagi maka bisa mencapai kuorum.

Mengawali Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BKP, Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Tahunan BPK dilakukan oleh Akuntan Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPK RI dan Menteri Keuangan masing-masing telah mengusulkan 3 nama Kantor Akuntan Publik, yaitu:

1. KAP Heliantono dan Rekan,
2. KAP Joko, Sidiq dan Rekan,
3. KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan;
4. KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan;
5. KAP Husmi, Mucharam dan Rasidi;
6. KAP Suhartono.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada KAP Heliantono dan Rekan setelah itu KAP Sriyadi dan KAP Karsono.

Kami persilakan masing-masing 5 menit.

### **CALON KAP (KAP HELIANTONO DAN REKAN):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Bapak Pimpinan yang kami hormati,  
Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini kami akan memaparkan secara singkat mengenai rencana kami mengaudit.

Mohon maaf Bapak Ketua, untuk KAP apa perlu menunggu diluar atau bagaimana, apa kita tunggu semua disini.

**KETUA RAPAT:**

Di sini saja, sama saja semua di sini.

**CALON KAP (KAP HELIANTONO DAN REKAN):**

Terima kasih.

Jadi yang pertama adalah kami memperkenalkan diri. Kantor Akuntan kami itu berdiri sejak tahun 1996, sekarang partnernya itu 28. Kami mempunyai cabang di 4 cabang dan jumlah karyawan sekitar 200. Pengalaman kami mengaudit sektor Pemerintah, kami pernah mengaudit Kementerian dan pernah juga mengaudit di Kabupaten, laporan keuangan kabupaten. Kami berada di TB. Simatupang kantornya.

Kemudian kami akan langsung menuju metodologi. Jadi metodologi yang kami gunakan itu adalah standar yang sesuai dengan ketentuan dari IAPI kita menggunakan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dan juga SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara), itu ada dua standar yang menjadi patokan kami.

Dan kemudian pertama kali kami akan masuk melihat struktur pengendalian internnya, kami juga menggunakan Coso Framework. Kemudian kami melakukan analytical test dan kemudian juga kami menentukan materialitasnya. Jadi atas dasar materialitas itu kami akan memberikan opini, apakah nanti WTP, WDP, atau opini yang lain.

Kemudian untuk metodologinya kami akan menggunakan Atlas, Atlas ini adalah aplikasi audit yang di-*create* oleh Kementerian. Jadi kami menggunakan itu karena itu sudah sesuai dengan standar dan itu sudah bisa diaplikasikan.

Kemudian nanti pada saatnya kami juga akan meminta BPK untuk membuat mungkin *counterpart*, lalu kami nanti pada awalnya kami akan mengidentifikasi *finding* audit tahun sebelumnya, lalu memantau tindaklanjutnya bagaimana apakah sudah ditindaklanjuti 100%, 90% atau belum. Itu juga sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian kami juga akan melihat IT-nya yang diaplikasikan di BPK seperti apa. Kami juga di tim itu ada yang IT *expert*-nya di dalam tim. Kemudian nanti pada saatnya kami akan juga melakukan pengujian-pengujian, pengujian itu mulai dari pengujian pengendalian, analytical sampai dengan ....

Yang kami uji seperti biasa adalah *completeness, existence, right and obligation, valuation and allocation, presentation and disclosure*. Jadi itu standar memang itu yang diaudit *account-account*-nya. *Account* yang kami audit itu hanya yang lewat dari *performance material*, jadi kalau bukan *performance material* itu memang tidak perlu kami audit, itu sesuai dengan SPAP seperti itu.

Kemudian nanti ketika kami misalkan kami pada saatnya nanti menemukan sesuatu yang diluar prosedur, itu kami menyebutnya sebagai notisi audit. Dengan notisi audit itu nanti kami akan bahas di tingkat Satkernya dulu, di tingkat cabangnya atau di tingkat perwakilannya. Nanti setelah di tingkat perwakilan baru kami bawa ke level pusat.

Jadi terus kami juga fokus resikonya mulai dari belanja modal sampai dengan belanja pegawai. Belanja modalnya adalah kepemilikan aset tetap, manajemen barang investasi, pemutakhiran informasi di Simak-BMN. Kemudian kalau belanja pegawainya mulai dari penggajian sampai dengan uang perjalanan dinas. Itu yang akan kami laksanakan.

Kami juga sudah membentuk struktur timnya, itu mulai ada dari *partner in charge*, ada *concurring partner*, ada *manager*, *quality assurance*, *tax specialist*, *IT specialist*, ketua tim dan Anggota Tim. Timnya itu ada 8 tim yang dibagi-bagi nanti akan disebar ke seluruh perwakilan.

Kami juga sudah menentukan jadwalnya tim 1 kemana, tim 2 kemana, tim 3 kemana, dan ngapain saja itu kami juga sudah apa yang dilakukan disana itu sudah direncanakan dalam presentasi.

Demikian juga mengenai anggaran biayanya kami sudah sampaikan. Jadi kami rencananya itu melakukan audit adalah sekitar 3 bulan, hampir 3 bulan mulai dari pendahuluan sampai dengan draft final audit, itu yang akan kami laksanakan.

Demikian dari kami presentasinya, mohon maaf apabila kurang berkenan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Kami persilakan Husni, Mucharam dan Rasidi.

#### **CALON KAP (KAP HUSNI, MUCHARAM DAN RASIDI):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi XI DPR RI dan para Anggota Komisi XI DPR RI,  
Serta Bapak-bapak dan Ibu yang hadir pada pertemuan ini.**

Kami dari Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam dan Rasidi. Pendirian dan perizinan kami berdiri tahun 1994, keanggotaan terdaftar di IAPI, kemudian OJK, kemudian juga di Bank Indonesia, kemudian di BPK RI, dan jadi rekanan di beberapa perbankan. Pada saat ini rekan di kantor kami ada 4, saya sendiri Budi Terima kasih Wibawa sebagai Pimpinan Rekan, kemudian Bapak Husni Arvan, Bapak Supandi dan Bapak Arry Syarief Gunawam.

Pengalaman audit, kami merupakan auditor BPK untuk tahun lalu, yaitu tahun 2017. Sebelumnya kami sudah pengalaman mengaudit BPK di tahun 2009 yang pertama, kemudian 2012 dan tahun 2013. Selain BPK, pengalaman audit kami untuk audit BUMN kurang lebih ada 35 perusahaan BUMN, kemudian perbankan, kemudian perusahaan swasta nasional kurang lebih ada 160 perusahaan yang sudah pernah kami lakukan audit. Kantor kami di The Royal Palace, Blok C Jalan Soepomo. Kemudian sumber daya manusia saat ini kurang lebih ada 86 orang.

Selanjutnya untuk teknis pelaksanaan audit di BPK, yang pertama entitas yang akan kami audit meliputi Kantor Pusat atau Setjen, kemudian juga Pusdiklat dan Balai, kemudian ada yang baru itu Museum dan seluruh perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia.

Tujuan dan ruang lingkup audit adalah menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan BPK RI tahun 2018 sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Dalam hal ini ruang lingkungannya adalah:

1. Menilai efektifitas pengendalian internal,
2. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
3. Menilai kecukupan pengungkapan, dan
4. Memantau tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya.

Komponen laporan keuangan yang kami audit meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Neraca,
3. Laporan Operasional,
4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Program audit kami meliputi pelaksanaan prosedur-prosedur yang dirancang agar memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan di atas bebas dari salah saji yang material.

Standar audit yang digunakan ada dua, yaitu:

1. Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dan
2. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Tahap audit, dimulai dari persiapan kemudian kami lakukan test control, pengujian, kemudian selanjutnya test substantive atas angka-angka dan terakhir finalisasi untuk menyampaikan laporan.

Metodologi yang kami rancang adalah melakukan pendekatan resiko atau *risk based approach* berdasarkan hasil *risk assessment*. Tim akan mengidentifikasi saldo-saldo akun dan kelompok transaksi mana yang pada laporan keuangan yang paling tinggi resiko salah saji. Faktor-faktor resiko, meliputi:

1. Operating Risk,
2. Accounting Risk,
3. Compliance Risk.

Kemudian audit juga dilakukan terhadap seluruh satuan kerja atau populasi.

*Risk focus* kami berdasarkan pengalaman sebelumnya di belanja modal adalah masalah pemutakhiran SIMAK-BMN dan SAKPA, kemudian administrasi aset tetap, kemudian keakuratan Kartu Inventaris barang. Untuk di belanja barang fungsi verifikasi dokumen perjalanan dinas, kemudian sediaan daluarsa.

Selanjutnya strategi yang akan kami lakukan adalah:

1. Mengidentifikasi temuan-temuan audit sebelumnya,
2. Mengidentifikasi tindak lanjut yang telah dilakukan oleh BPK RI,
3. Pendayagunaan teknologi sisten informasi,
4. Pengujian pengadaan barang modal dilaksanakan di Kantor Pusat sebelum ke satuan-satuan kerja,
5. Temuan langsung dibahas di tingkat Satker,
6. Pembentukan tim *counterpart* BPK RI untuk kelancaran pelaksanaan,
7. Pelaksanaan audit Satker dilakukan secara pararel dan serial.

Pembagian subtim audit, kami bagi menjadi 8 masing-masing sudah kami rancang untuk daerah-daerah yang mana untuk memudahkan pergerakannya. Selanjutnya struktur organisasi nanti yang *incharge* adalah Bapak Husni Arvan, kemudian saya menjadi menager, nanti ada quality control, kemudian ada tax specialist, ada IT specialist, kemudian supervisor, ada ketua tim gabungan dan ketua subtim untuk masing-masing daerah.

Rencana jadwal audit dibuat 3 bulan sejak mulai pelaksanaan perencanaan sampai dengan penyelesaian laporan final.

Demikian dari kami Bapak dan Ibu sekalian.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Bapak Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan.

#### **CALON KAP (KAP SRIYADI ELLY SUGENG DAN REKAN):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi XI DPR RI,  
Yang terhormat Pimpinan Rapat Komisi XI DPR RI,  
Yang terhormat Anggota Komisi XI DPR RI.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BPK RI dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan rencana kerja

audit laporan keuangan BPK.

Sebelum saya lanjutkan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sriyadi Pimpinan dari KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan. Bersama saya ada Bapak Sugeng, partner di tempat kami, Bapak Farhan dan Ibu Fitri.

Kami lanjutkan, KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan berdiri pada tahun 2003, 15 tahun yang lalu. Kemudian 5 tahun yang lalu kita bergabung dengan Kudos Internasional Network. Saat ini memiliki 5 partner dan kurang lebih 60 staf. Kemudian pengalaman audit yang relevan dengan audit BPK RI.

Lanjut, untuk tahun anggaran 2016 kami mengaudit laporan keuangan BPK RI, jadi dua tahun yang lalu. Tahun kemarin Bapak Husni dan tahun sebelumnya kita yang audit. Kemudian pengalaman lain yang relevan ada beberapa BLU kita audit, ada BBD, beberapa PTNBH. Dan untuk tahun buku 2016 kita ditunjuk atau dipercaya BPK untuk melakukan audit untuk dan atas nama BPK RI. Kemudian untuk pengalaman yang lain yang relevan, yaitu beberapa audit untuk non profit organisasi serta beberapa *review* untuk satuan kerja audit internal bank.

Latar belakang audit tadi sudah Pimpinan sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32 Ayat (1), yaitu menyatakan bahwa “pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR RI atas usulan BPK dan Kementerian Keuangan”.

Tujuan audit adalah untuk melakukan pengujian *reasonable assurance*, keyakinan yang memadai untuk menilai efektif, efisien dan ekonomis.

Dasar hukum atau landasan audit BPK RI adalah tadi pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

Ruang lingkup audit tadi sudah dijelaskan sama rekan saya kurang lebih sama, yaitu untuk menguji kesesuaian apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan. Penilaian atas efektifitas sisten pengendalian intern. Penilaian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. Penilaian atas kecukupan pengungkapan laporan keuangan. Lingkup pengujian adalah merupakan 74 DIPA di Satker BPK RI, ada 1 Setjen, ada BPK Pusat, BPK perwakilan di 34 Provinsi, Pusdiklat, dan Badan Pelatihan.

Kemudian lanjut, standar teknis yang kita gunakan, yaitu standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI, serta standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institute Akuntan Publik Indonesia. Lebih relevan, lebih tepat kita menggunakan SA250 yaitu pertimbangan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam audit laporan keuangan.

Lanjut, maksud dan tujuan audit yaitu menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan BPK RI. Menilai kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintahan. Menilai sistem pengendalian intern dan menilai kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Setelah audit selesai laporan indikator laporan yang akan kita keluarkan laporannya adalah laporan auditor independen yang memuat opini atas laporan keuangan. Laporan hasil penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan laporan hasil penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Organisasi BPK RI kita akan melakukan pengkajian internal, yaitu organisasi internal, ketua, wakil ketua dan 7 Anggota, ada staf ahli, ada inspektorat utama, kemudian Badan Diklat, auditor utama keuangan negara (AKN) 1-7, auditor utama investigasi, 2 direktorat (DITEPP dan DITAMA BINBANGKUM) serta 34 perwakilan.

Sedangkan untuk organisasi eksternal, laporan BPK nanti akan digunakan atau diserahkan kepada DPR RI, DPRD RI, kemudian digunakan oleh masyarakat dalam hal ini melalui web atau melalui keterbukaan informasi, investigasi keuangan negara oleh Kejaksaan ataupun KPK, konsolidasi laporan keuangan dengan laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Peer Review negara-negara yang tergabung dalam Intosai.

Prosedur audit, kita audit berdasarkan *risk based audit*, yaitu pertama dengan diskusi dengan manajemen dan pihak lain, prosedur analitikal dan pengamatan atau inspeksi. Sedangkan 3 prosedur audit langkah-langkah yang kita lakukan adalah melakukan *assessment* terhadap *business risk*, *fraud dan error risk*, kemudian *financial assessment risk*. Di dalam audit kita mengenal juga ada resiko yang harus kita tanggung ketika audit, yaitu resiko bawaan, *inherent risk*, ada *control risk*, dan ada signifikan *risk*. Semua akan kita pertimbangkan ketika melakukan prosedur audit.

Kemudian identifikasi resiko ketika audit BPK adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini kita lakukan fokus, kemudian belanja perjalanan dinas ada beberapa pengungkapan dari tadi teman saya hampir sama juga mengenai perjalanan dinas. Kemudian penetapan HPS yang tidak didukung dengan bukti survey pasar, aset tetap yang tidak terinventarisasi, dan beberapa yang menjadi fokus perhatian kita.

Kemudian metodologi audit, sesuai dengan Juknis dari SBKN ada 22 langkah di dalam audit, yaitu secara detail dalam langkah pertama sampai dengan 22. Pada saat perencanaan kita memiliki 10 tahap atau langkah, kemudian pada tahap pelaksanaan 7 langkah dan pada saat pelaporan ada 5 tahap atau 5 langkah.

Kemudian untuk menjamin hasil atau valitas audit saya menerapkan ISQC1 atau di IAPI disebut dengan SBM1, yaitu pengendalian mutu bagi KAP yang melaksanakan *quality assurance*, serta SA220 pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Ini yang kita pakai untuk dasar mengenai *quality assurance*.

Kemudian organisasi tim kita akan struktur dari signing partner, QC partner, maager, supervisor dan ketua tim. Kita bagi ketua tim ada di pusat, kemudian perwakilan timur dan tengah. Untuk detailnya lanjut. Kemudian lanjut, tenaga ahli. Tenaga ahli yang kita lihat bagan ada 36 dari partner sampai dengan staf dipresentasi kita sampaikan secara detail.

Kemudian lanjut mengenai jadwal kerja. Jadwal kerja kita harapkan laporan ini bisa selesai di akhir bulan Mei, sehingga otomatis 2 bulan, 1 bulan kita akan lakukan audit lapangan dari 4 April sampai dengan 30 April. Kemudian pembahasan konsep sampai dengan laporan dan diharapkan laporan akan tepat waktu selesai 31 Mei



2019. Jadwal rinci ada di tabel berikutnya, kemudian susunan tim saya juga sudah menyiapkan susunan tim terdiri dari 9 tim. Ada detail mengenai wilayah-wilayah dan jadwal waktunya sudah kita sampaikan untuk bahan pertimbangan.

Kemudian strategi audit, kita akan fokus kepada pemeriksaan yang didasarkan kepada besaran anggaran masing-masing perwakilan minimal bisa tercover 70% dari anggaran. Kemudian pendekatan strategi audit dengan penilaian *control assessment* untuk menentukan *critical area* dan juga pemanfaatan penilaian yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Kemudian kita juga akan memanfaatkan pendekatan dari hasil audit yang dilakukan oleh aparat internal Pemerintah, Itjen BPK, sebagai dasar untuk fokus audit dan menilai *Fraud and Error Risk Assessment*. Hasil audit tahun sebelumnya, menjalin komunikasi dengan audity dan menambah tenaga ahli jika diperlukan.

Manajemen kertas kerja saya rasa standar di kantor kita, kita menggunakan PCP Audit Program, kemudian menggunakan PAF, Checklist dan terakhir menggunakan Microsoft Office. Kemudian alat bantu, kita juga ketika audit menggunakan alat bantu *Audit Command Language (ACL)*, *Arbutus Analyzer* dan Microsoft. Peralatan, saya rasa kita cukup untuk melakukan, peralatan yang kita miliki cukup untuk audit BPK.

Saya rasa itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dari Pimpinan Dewan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terakhir Bapak Wisnu Karsono.

**CALON KAP (KAP WISNU KARSONO SOEWITO DAN REKAN):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Bapak Ketua Komisi XI DPR RI dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir pada siang hari ini.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Kami dari Kantor Akuntan Publik Wisnu Karsono Soewito dan Rekan. Yang pertama mungkin kami sampaikan kantor kami berdiri dari tahun 1981 yang berdomisili di Jakarta dulu dengan nama Kantor Akuntan Publik Wisnu B. Soewito. Kemudian di tahun 2004 berubah menjadi Wisnu B. Soewito dan Rekan. Dan perubahan terakhir di tahun 2018 tanggal 12 September 2018 berubah menjadi Kantor Akuntan Publik Wisnu Karsono Soewito dan Rekan.

Anggota rekan kami, yaitu ada 3 orang saya sendiri yaitu dengan R. Dwi Karsono Soewito sebagai Pimpinan Rekan dan kemudian Bapak Wisnu B. Soewito sendiri di sebelah samping saya adalah rekan dan juga founder dari kantor kami. Kemudian Rando P. Wullur sebagai rekan.

Sejak 21 Januari 2011 kantor kami beraviliasi dengan JPA Internasional perusahaan group professional yang memiliki jaringan keanggotaan kurang lebih 140 *member firms* yang meliputi 46 negara dengan Kantor Pusat di Paris, Perancis.

Kami juga telah berpengalaman dalam melakukan audit atas laporan keuangan BPK RI untuk tahun buku 2008, 2010, 2011, 2014 dan 2015. Kemudian pemahaman tentang KAK itu tadi mungkin sudah dijelaskan dengan rekan-rekan lain bahwa 3 nama dari Departemen Keuangan dan 3 nama dari BPK RI yang akan diajukan ke Komisi XI DPR RI.

Lanjut, berdasarkan hal tersebut maka di sini rencananya dari 3 nama itu akan dipilih satu untuk pemeriksaan atas laporan keuangan BPK RI. Sasaran kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah yang akuntable dan transparan.

Lanjut, lingkup pekerjaan adalah pemeriksaan umum (general audit) atas Laporan Keuangan BPK RI tahun buku 2018 berdasarkan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan termasuk:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
2. Penilaian Efektifitas Sistem Pengendalian Intern,
3. Penilaian Kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan,
4. Penilaian atas Kecukupan Pengungkapan.

Lanjut, hasil pekerjaan nantinya yang akan kami sampaikan adalah:

1. Laporan auditor independent atas Laporan Keuangan BPK RI tahun buku 2018,
2. Laporan hasil penilaian atas efektifitas sistem pengendalian intern,
3. Laporan hasil penilaian atas kepatuhan.

Masing-masing laporan yang akan kami sampaikan adalah sebanyak 15 aksemplar, khusus untuk laporan keuangan akan disajikan berdasarkan dua bahasa atau bilingual.

Lanjut, saat ini BPK memiliki 41 satuan kerja yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat BPK RI, Pusdiklat, 3 Balai Diklat, Museum BPK RI dan 34 kantor perwakilan di tiap Provinsi.

Oke, kemudian metodologi yang akan kami lakukan adalah pendekatan audit kami adalah berbasis resiko atau *risk based audit* dengan cara mengidentifikasi area resiko pada tiap akun dan menilai resiko umum secara keseluruhan. Dimana audit program yang direncanakan dapat menghasilkan bukti yang memadai, relevan dan *reliable*. Yang mana selanjutnya akan ditentukan *tolerable risk* atau resiko yang dapat ditoleransi yaitu sebesar 30% setiap akun.

Dalam hal pemeriksaan terdapat salah saji, maka atas salah saji tersebut dapat ditoleransi. Namun, jika ternyata melebihi dari 20% maka harus dipertimbangkan

pengaruhnya secara keseluruhan terhadap laporan keuangan dan apakah harus dinyatakan dalam pernyataan pendapat/opini atau tidak. Jika tidak, maka dapat ditoleransi lagi sebesar 20% dari total aset, total pendapatan maupun total beban. Oke, standar pemeriksaan seperti tadi sudah adalah SPKN dan SPAP.

Lanjut, untuk mencapai tujuan tersebut maka kami akan melakukan prosedur untuk laporan auditor independent atas laporan keuangan dan juga hasil penilaian efektifitas sistem pengendalian intern, yaitu kami akan melakukan penelaahan atas pengendalian intern dengan mengisi formulir *internal control questioner*. Kemudian kami akan melakukan *walkthrough*, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan butir satu di atas. Kemudian kami akan melakukan pengujian efektifitas atas sistem pengendalian internnya. Lalu kemudian kami akan melakukan *review* dari teknologi informasi (*Information Technology General Control/ITGC*).

Untuk prosedur-prosedur di atas adalah bagian dari pemeriksaan laporan keuangan dan sebagai dasar juga kami untuk menyajikan laporan hasil *review* penilaian atas efektifitas sistem pengendalian intern.

Dalam pelaporan tentang pengendalian intern atas pelaporan keuangan, sejauh memungkinkan kami akan mengembangkan unsur-unsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab dan harus dilengkapi tanggapan dari Pimpinan atau pejabat yang terkait, serta tindakan koreksi yang direncanakan. Ini diatur di SPKN, yaitu PSP 200 paragraf 34 dan PSP 300 paragraf 17.

Lanjut, kemudian kami akan melakukan penilaian resiko atau *risk assessment* dengan mengisi formulir *risk assessment*. Hasil dari *risk assessment* akan berpengaruh terhadap luasnya pemeriksaan kami yang dicantumkan dalam audit program. Lalu kami akan menentukan *materiality assessment*, hal ini untuk menentukan *prosentase audit materiality* yang akan digunakan dalam mengisi formulir *materiality assessment*. Lalu kami akan membuat audit planning memorandum yang kurang lebih isinya adalah pemahaman tentang kegiatan BPK dan seterusnya.

Untuk selanjutnya, untuk laporan penilaian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. Metodologi pemeriksaan kami adalah mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN, yaitu Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017, yaitu pernyataan standar pemeriksaan 100 atau standar umum. Pengujian kepatuhan perundang-undangan diarahkan kepada peraturan perundang-undangan, kontrak dan produk hukum lainnya yang berhubungan langsung dan material terhadap hal yang pokok atau informasi hal pokok yang diperiksa.

Lanjut, pengaruh langsung dan material dapat berupa:

1. Hal yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan,
2. Hal yang menyebabkan penyimpangan kinerja terkait aspek ekonomi, efisien, dan efektifitas,
3. Hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi, dan/atau
4. Hal yang menyebabkan potensi kerugian negara atau kerugian daerah atau kerugian keuangan negara atau daerah.

Ini diatur dalam PSP 100 paragraf 20.

Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, maka peraturan perundang-undangan yang akan uji antara lain namun tidak terbatas, yaitu:

1. Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2018 beserta aturan pelaksanaannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan juga peraturan yang terakhirnya itu kemudian dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Lanjut, kemudian kontrak atau surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga yang nanti terkait dengan pemeriksaan itu juga dengan Perpres dan tadi juga itu akan kami periksa. Lanjut, kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu Peraturan RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.

Metodologi pemeriksaan ini adalah kami akan melakukan wawancara dengan unit yang terkait, mengumpulkan bukti-bukti dari tindak lanjutnya jika ada, dan membuat resume hasil wawancara dengan pengumpulan bukti-bukti.

Metodologi sampling yang akan kami gunakan adalah statistical sampling dengan memperhatikan konsep materialitas. Unit akuntansi yang akan kami periksa adalah seluruh satuan kerja, yaitu berdasarkan populasi karena ini yang disyaratkan di dalam KAK.

Lanjut, bidang area yang juga menjadi sasaran sampling adalah transfer dana dari kantor pusat atau perwakilan atau Satker atau sebaliknya, belanja tetap, pegawai, umum dan lain-lain, belanja aset tetap, belanja operasional rutin, dan proses-proses pengadaan dan lain-lain.

Kemudian ini adalah bagan arus pemeriksaan kami mulai dari survey pendahuluan, kemudian internal control dan ITGC, *risk assessment*, dan seterusnya sampai dengan finalisasi audit report.

Lanjut, kemudian kami akan melakukan *quality assurance review* yang dimana proses ini akan dilakukan pada waktu proses pemeriksaan maupun saat konsep laporan telah selesai dan siap untuk diserahkan kepada *partner in charge*. Namun, sebelum diserahkan terlebih dahulu akan kami cek dulu untuk kualitas dari kertas kerja maupun laporannya oleh *quality assurance manager*, apakah kualitasnya sudah sesuai dengan pedoman standar pengendalian mutu yang berlaku di kantor kami atau tidak. Kemudian sebelum draft laporan diterbitkan diserahkan terlebih dahulu kepada *signing partner* untuk mendapatkan persetujuan.

Baik lanjut, ini rencana jadwal pelaksanaan kami. Ini karena memang sempat mundur pembahasan hari ini, maka ini kami rencanakan kemarin mulainya di tanggal 1 Maret. Tapi pada prinsipnya adalah kami lakukan selama 90 hari kalender.

Lanjut, ini tim yang akan kami turunkan adalah sebanyak 10 tim kurang lebih dengan tenaga sebanyak 24 orang. Ini masing-masing untuk daerah mana saja sudah

kami tentukan dan kami rencanakan hari ini.

Terima kasih dari kami.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, teman-teman ada yang ingin diperdalam?

Ada yang ingin diperdalam teman-teman? Tidak ada ya, kalau tidak ada mungkin kita nanti Rapat Intern dulu.

**Baik, Bapak-bapak dari Kantor Akuntan.**

Kita sudah mendengarkan dan sudah punya bahannya. Setelah ini kita mau Rapat Intern memutuskan kantor mana yang akan dipilih menjadi Akuntan Publik untuk BPK.

Terima kasih atas pemaparannya dan nanti tunggu pengumumannya di Paripurna. Kita Paripurna tanggal 28 Maret 2019.

Baik, sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)**

**Jakarta, 25 Maret 2019**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**

**ttd**

**Drs. Urip Soediarwono  
NIP. 19620521 198203 1 001**